

**KEBERDAYAAN MASYARAKAT BINAAN MELALUI
PROGRAM SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN DI
PEDESAAN DI KECAMATAN MANGNGARABOMBANG
KABUPATEN TAKALAR**

***COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH THE
ACADEMICIAN ACTIVATORS VILLAGE DEVELOPMENT
PROGRAM (SP3) IN MANGNGARABOMBANG SUB-
DISTRICT, TAKALAR REGENCY***

ZULKIFLI



PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

**KEBERDAYAAN MASYARAKAT BINAAN MELALUI
PROGRAM SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN DI
PEDESAAN DI KECAMATAN MANGGARABOMBANG
KABUPATEN TAKALAR**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Disusun dan diajukan oleh

ZULKIFLI

kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zulkifli
Nomor Mahasiswa : P0200211001
Program studi : Perencanaan dan Pengembangan
Wilayah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar,
Yang menyatakan

Zulkifli

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan kesehatan, kecerdasan otak dan kemampuan jasmani dan rohani, sehingga segala aktifitas keseharian kita selalu dilalui dengan semangat dan keuletan mengerjakan tesis ini. Dan tidak lupa pula penulis haturkan salam dan salawat kepada junjungan nabiullah Muhammad Saw.

Dalam tesis ini, penulis telah banyak menemukan berbagai berbagai macam hal yang cukup penting dan perlu untuk disegerakan evaluasinya, sebab tesis yang berjudul *Keberdayaan Masyarakat Binaan Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan di Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar* merupakan terobosan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang hal ini bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melibatkan pemuda terdidik untuk mendampingi masyarakat melakukan program-program yang sifatnya dapat membantu mengeksplorasi kemampuan kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat setempat sesuai dengan potensi wilayah yang ada di daerah tersebut.

Banyaknya hal yang telah ditemukan dalam tesis ini adalah langkah utama yang perlu dilakukan sebagai rumusan baru sistem

pembangunannya. Adapun hasilnya yang baik perlu upaya peningkatan, sementara yang kurang berdaya diperlukan rumusan perbaikannya. Sehingga terjadi perubahan mendasar yang akan lebih membantu meningkatkan keberdayaan masyarakat binaan setempat.

Pada kesempatan ini penulis tulus hati menyampaikan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Tahir kasnawi, SU. selaku ketua komisi penasihat dan Bapak Prof. Dr. Ir Andi Rahman Mappangaja, MS selaku anggota komisi penasihat atas segala daya dan upaya pembimbingan. Rektor Universitas Hasanuddin atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan di lembaga yang dipimpinnya, Direktur Program Pascasarjana beserta jajaran dan stafnya, kepada Bapak penguji, Prof. Dr. Ir. Roland Barkey, Prof. Dr. I Made Benyamin, M.Ec, Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, M.S, terima kasih atas arahan dan masukan sehingga penulis mendapatkan masukan berharga bagi kesempurnaan tesis ini.

Demikian halnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, terkhusus kepada kedua orang tua penulis, A. Karim Tutu dan St. Saerah Taugi, H. Basoddin dan Hj. Sabiyani, istriku tercinta Nurhidayat, S.KM, yang telah memberikan kasih sayang dan semangat yang tulus. Ust. Hamka Badaruddin, Ust. Muhtar Lutfi, dan teman-teman PPW 2011, serta fasilitator SP3 Takalar.

Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih terdapat berbagai kekurangan, sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan, agar lebih memberikan bobot maksimal

bagi kesempurnaan tesis ini. Semoga hasilnya bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi kita semua terlebih terhadap upaya pengembangan dan pemberdayaan potensi-potensi masyarakat berupa sistem nilai budaya lokal dimasa yang akan datang.

Makassar, 1 juli 2013

ZULKIFLI

ABSTRAK

ZULKIFLI. *Keberdayaan Masyarakat Binaan Melalui Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP3) di Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar* (dibimbing oleh **Tahir Kasnawi** dan **Andi Rahman Mappangaja**).

Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat partisipasi dan keberdayaan masyarakat binaan SP3 di Kecamatan Manggarabombang. Penelitian ini menggambarkan tingkat partisipasi dan tingkat keberdayaan masyarakat binaan selama program berlangsung.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode survei dengan mewawancarai sembilan belas orang sebagai responden. Metode penarikan sampel menggunakan metode *purposive samplig* dengan mengambil masyarakat binaan SP3 untuk diteliti tingkat partisipasi dan tingkat keberdayaannya selama mengikuti program yang telah berlangsung sejak 2010 sampai sekarang. Pengolahan data dilakukan dengan perhitungan skor dan diuraikan secara deskriptif. Tingkat partisipasi dan keberdayaan masyarakat binaan SP3 dianalisis menggunakan tabel keunggulan dan kelemahan masyarakat binaan dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis keberdayaan masyarakat *Fujikake* yang terdiri atas enam indikator, yaitu kemampuan mengemukakan opini, perubahan kesadaran, kreatifitas menyusun tujuan baru, kepercayaan diri, dan keterampilan manajerial. Indikator tersebut diukur melalui lima pertanyaan. Setiap pertanyaan diberi skor, tidak berdaya 0.0-1.0, kurang berdaya 1.1-2.0, agak berdaya, 2.1-3.0, cukup berdaya 3.1-4.0, sangat berdaya 4.1-5.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberdayaan masyarakat binaan SP3 cukup baik dengan skor nilai rata-rata 3.48, namun diperlukan upaya perbaikan dan pendampingan lebih profesional sebab dalam analisis tersebut terdapat dua indikator yang kurang yaitu, keterampilan manajerial dengan skor 3.14 dan kemampuan mengemukakan opini dengan skor 2.79.

Kata kunci: Partisipasi, Keberdayaan, SP3, Masyarakat

ABSTRACT

ZULKIFLI. Community Empowerment through the Academician Activators Village Development Program (SP3) in Mangngarabombang Sub-District, Takalar Regency (Supervised by **Tahir Kasnawi** and **Andi Rahman Mappangaja**).

This study aims to investigate the participation level and the empowerment of the community as developed by SP3 in Mangngarabombang Sub-District. The purpose was to describe the level of the community's participation and the empowerment levels during the implementation of the program.

The research was conducted in Mangngarabombang Sub-District, Takalar Regency. The method used was a survey method by interviewing 19 respondents, who were chosen using the purposive random sampling technique from the community members participating in the SP3 program. The objects of the study were the levels of their participation and the empowerment while they were joining the program from 2010 until now. The data were then processed in order to calculate the scores and analyze them descriptely. The levels of the participation and empowerment the community fostered by SP3 were analysed using the tables of their strength and weakness followed by the empowerment analysis using Fujikake which consists of six indicators, namely, their ability to express opinions, the change of their awareness, their creativity to prospect new targets, their self-confidence, and their managerial skills. These indicators were measured by asking five questions. Each question was scored: powerless = 0.0 to 1.0, less empowered = 1.1-2.0, fairly empowered = 2.1-3.0, empowered = 3.1-4.0, dan very empowered = 4.1 to 5.0.

The research result indicated that the empowerment level of the community was good enough with average value of 3.48, though some improvement and a more professional assistance were still needed because the analysis still revealed at least two unsatisfactory indicators, namely the score of the managerial skill was 3.14 and the score of the ability to express opinions was only 2.79.

Keywords: Participation, empowerment, SP3, community

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	v
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemberdayaan Masyarakat	7
B. Konsep Pemberdayaan	11
C. Tujuan Pemberdayaan	15
D. Partisipasi Masyarakat	21
E. Tujuan Pemberdayaan	27

F. Pendampingan Masyarakat	29
G. Evaluasi Pemberdayaan	31
H. Pembangunan Pedesaan	39
I. Gambaran pelaksanaan Program SP3	44
J. Kerangka Pikir	50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian	53
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	53
C. Metode Pengumpulan Data	54
D. Populasi dan Sampel	55
E. Jenis dan Sumber Data	55
F. Analisis Data	56
G. Skor Mean	58
H. Definisi Operasional	59

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian	62
1. Gambaran Umum Kecamatan Mangngarabombang	62
1. Letak Geografis	62
2. Kondisi Demografi	65
2. Potensi Wilayah Kecamatan Mangngarabombang	65
B. Identitas dan Karakteristik SP3	66
C. Identitas dan Karakteristik Anggota SP3	71
1. Identitas Responden Berdasarkan Kelompok Umur	71

2. Identitas Anggota SP3 Berdasarkan Jenis Kelamin	72
3. Identitas Anggota SP3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan	73
D. Analisis Partisipasi Masyarakat Binaan	76
1. Mengerti Maksud dan Tujuan SP3	77
2. Menghadiri Pertemuan/undangan	78
3. Mempunyai Peran dalam Program SP3	79
4. Partisipasi Tahap Perencanaan	80
5. Partisipasi Masyarakat Binaan Berdasarkan Tahap Pelaksanaan	81
6. Partisipasi Tahap Pengawasan	83
7. Tanya Jawab dengan Pemerintah/Tokoh/Pengusaha	84
E. Analisis tingkat keberdayaan masyarakat binaan	86
1. Mengemukakan opini	86
2. Perubahan kesadaran	88
3. Kreatifitas	89
4. Kepercayaan diri	91
5. Keterampilan manajerial	92
F. Hasil dan Pembahasan Tingkat Partisipasi dan Tingkat Keberdayaan	
1. Tingkat Partisipasi	93
2. Tingkat Keberdayaan	95
3. Skor Mean	96
G. Skor mean tingkat keberdayaan masyarakat	96

1. Urutan tingkat partisipasi	103
2. Urutan tingkat keberdayaan	103
H. Analisis keunggulan dan kelemahan tingkat keberdayaan	105
I. Analisis keberdayaan fujikake	115
1. Tahap pertama	115
2. Tahap kedua	117
3. Tahap ketiga	120
4. Tahap keempat	122
J. Usulan perbaikan	123

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	127
B. Saran	128

DAFTAR PUSTAKA

130

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jenis keterampilan/vokasi	48
2. Standar partisipasi	58
3. Standar keberdayaan	58
4. Desa/kelurahan dan luas daerah	61
5. Banyaknya penduduk setiap desa di Kecamatan Manggarabombang	64
6. Kelompok masyarakat binaan setiap desa di Kecamatan Manggarabombang	67
7. Distribusi masyarakat binaan SP3 berdasarkan kelompok umur	71
8. Distribusi masyarakat binaan SP3 berdasarkan jenis kelamin	72
9. Distribusi masyarakat binaan SP3 berdasarkan tingkat pendidikan	74
10. Distribusi masyarakat binaan SP3 berdasarkan tingkat partisipasi	75

11. Distribusi hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat keberdayaan	76
12. Distribusi masyarakat binaan SP3 berdasarkan pengetahuan tentang maksud dan tujuan SP3	77
13. Distribusi masyarakat binaan SP3 berdasarkan keikutsertaan/undangan	78
14. Distribusi masyarakat binaan SP3 berdasarkan Peran penting dalam program	79
15. Distribusi masyarakat binaan SP3 berdasarkan partisipasi tahap perencanaan	80
16. Distribusi masyarakat binaan SP3 berdasarkan tahap pelaksanaan	81
17. Distribusi masyarakat binaan SP3 berdasarkan tahap pengawasan	83
18. Distribusi masyarakat binaan SP3 berdasarkan tanya jawab dengan pemerintah/tokoh/pengusaha	84
19. Distribusi masyarakat binaan SP3 berdasarkan kemampuan mengemukakan opini	87
20. Distribusi masyarakat binaan SP3 berdasarkan perubahan kesadaran	88
21. Distribusi masyarakat binaan SP3 berdasarkan tingkat kreatifitas	89
22. Distribusi masyarakat binaan SP3 berdasarkan tingkat kepercayaan diri	91

23. Distribusi masyarakat binaan SP3 berdasarkan tingkat keterampilan manajemen	92
24. Distribusi masyarakat binaan SP3 berdasarkan Tingkat Partisipasi	93
25. Distribusi masyarakat binaan SP3 berdasarkan Tingkat Keberdayaan	95
26. Skor mean tingkat partisipasi dan keberdayaan masyarakat binaan SP3	97
27. Skor mean tingkat partisipasi dan keberdayaan masyarakat binaan SP3	106
28. Kelemahan dan keunggulan masyarakat binaan	110
29. Skor mean analisis keberdayaan masyarakat binaan SP3 dengan menggunakan 6 indikator fujikake	117
30. Urutan keberdayaan masyarakat binaan SP3 dengan menggunakan 6 indikator fujikake	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Siklus pemberdayaan	13
2. Proses pemberdayaan	14
3. Tiga tipe hasil pemberdayaan	37
4. Evaluasi pemberdayaan menggunakan 12 indikator	38
5. Empat elemen inti pemberdayaan	38
6. Tingkatan pemberdayaan	39
7. Struktur organisasi SP3	49
8. Kerangka pikir penelitian	51
9. Peta administratif Kecamatan Manggarabombang	64
10. Tingkat partisipasi dan tingkat keberdayaan masyarakat binaan SP3	102
11. Grafik perubahan kesadaran masyarakat binaan SP3	106
12. Grafik keberdayaan masyarakat binaan SP3 dengan menggunakan 6 indikator Fujikake	118

DAFTAR LAMPIRAN

No.		Halaman
1.	Kuisisioner Penelitian	133
2.	Panduan Wawancara Mendalam	137
3.	Tabulasi Data Tingkat Partisipasi	138
4.	Tabulasi Data Tingkat Partisipasi	141
5.	Grafik Tingkat Partisipasi dan Keberdayaan	144
6.	Tabulasi Data Tingkat Kemampuan Mengemukakan Opini	145
7.	Tabulasi Data Tingkat Perubahan Kesadaran	147
8.	Tabulasi Data Tingkat Kreatifitas	149
9.	Tabulasi Data Tingkat keterampilan Manajerial	151
10.	Tabulasi Data Tingkat Kepercayaan Diri	153
11.	Indikator Keberdayaan Fujikake	155
12.	Crosstabs Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Partisipasi	156
13.	Crosstabs Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Keberdayaan	158
14.	Curriculum Vitae	160

BAB I

PENDAHULUAN

E. Latar Belakang

Pembangunan wilayah tidak dapat direalisasikan tanpa adanya perubahan-perubahan organisasi sosial dan sistem nilai, karenanya produktifitas dari suatu sistem ekonomi dan pengelolaan sumber daya dikondisikan oleh budaya dan kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Oleh karenanya tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah tidak hanya dimaknai dengan tingkat pertumbuhan dan produktifitas ekonomi serta kemajuan-kemajuan dibidang fisik saja, tetapi juga mempertimbangkan kinerja sosial, akses masyarakat pada pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan proses demokrasi (Hayami,2000 dalam PPW Ernam Sutandi).

Kemiskinan yang terjadi pada masyarakat membuat mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan juga membuat masyarakat sulit berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka dalam keadaan tidak mempunyai keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup, olehnya itu pemberdayaan sosial menjadi sesuatu yang sangat menunjang pembangunan masyarakat. Hal ini diperkuat oleh landasan konstitusional yang terdapat dalam tujuan Negara alinea IV pembukaan UUD 45 “membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpa darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. ” prioritas pembangun nasional saat ini difokuskan pada tiga strategi pokok, yaitu dikenal dengan *triple tract* strategi, yaitu upaya untuk mengurangi pengangguran, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan pertumbuhan (Gunawan Sumodingrat. 2002).

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*" (Chambers, 1995 dalam Ginanjar K 1997).

Pemberdayaan hadir, dicanangkan, dan diprogramkan sesuai dengan kondisi atau kebutuhan masyarakat setempat sehingga diharapkan hasil dari pemberdayaan bisa membuat perubahan sosial dan tepat pada sasaran pada sebuah komunitas miskin atau lemah. Program pemberdayaan telah lama dilakukan oleh pemerintah namun tidak sedikit yang mengalami kegagalan karena belum menyentuh pada kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan. Penyebab inilah yang akhirnya membuat LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat bergerak untuk menyingsingkan lengan untuk menuntaskan dan menghapus masalah kemiskinan dimasa sekarang dan dimasa depan (Yenny Kurnia, 2010).

Program SP3 telah berlangsung sejak tahun 1989, dengan tujuan untuk mengakselerasikan pembangunan melalui peran kepeloporan pemuda dalam berbagai aktivitas kepemudaan yang dapat berpengaruh

pada dinamisasi kehidupan pemuda desa, mengembangkan potensi sumber daya kepemudaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya desa.

Penyelegaraan SP3 merupakan wujud dari program peningkatan pemeratan pembangunan, sebagai roda perekonomian berjalan dengan baik, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggara SP3 ini juga dimaksudkan sebagai pemerataan tenaga terdidik menjadi kader wiraswasta dan penggerak dalam menumbuhkan kualitas sumber daya manusia.

Sarjana penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP3) salah satu model program pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan yang melibatkan pemuda berpendidikan (sarjana). Program SP3 pertama kali diluncurkan pada tahun 1989 (Awal Pelita V) sebagai salah satu upaya pemerintah mengatasi permasalahan kemiskinan yang menyebabkan ketertinggalan penanganan (Renova Munte, Tesis: 2009)

Sejak pelita V sampai sekarang ini, pemerintah telah menerjunkan 5000 Sarjana penggerak pembangunan di pedesaan di seluruh Indonesia. Di Propinsi Sulawesi Selatan sendiri penerimaan SP3 dilakukan setiap tahunnya, dengan sistem kontrak 3 tahun. Tahun 2010 penempatannya sebanyak 15 orang SP3 angkatan ke 17 dari berbagai disiplin ilmu ditempatkan di Kabupaten Takalar Kecamatan Manggarabombang. Kegiatan ini meliputi kerajinan tangan songkok guru, pengembangan usaha budidaya rumput laut dan kepiting, pengembangan objek wisata alam, dan lainnya.

Sampai saat ini program dari pemerintah ini masih berjalan, sebanyak 35 sarjana masih aktif yaitu angkatan ke 17 yang ditempatkan di desa-desa yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan. Menurut data BPS pada februari tahun 2008 jumlah penganggur terbuka sebanyak 9,42 juta orang atau sekitar 8,48 dari total angkatan kerja yang berjumlah 111,4 juta orang. Sekitar 78,38 dari penganggur tersebut adalah pemuda usia produktif (15-30 tahun) (Pedoman Umum SP3, 2010).

Program SP-3 antara lain bertujuan untuk mendorong dan memfasilitasi peran pemuda dalam membantu percepatan pembangunan desa di berbagai sektor, terutama sektor ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal. Tujuan ini dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) kewirausahaan bagi pemuda desa. Oleh karena itu, pada tahun 2009 ini Departemen Pendidikan Nasional dan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga melakukan sinergi program Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skill*) dengan Program SP-3 dalam rangka memperkuat peran SP-3 di bidang pengembangan kewirausahaan pemuda di desa.

Misi utama SP3 memberikan perhatian pada pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia di pedesaan. Dalam kaitan tersebut para sarjana diharapkan mampu melakukan berbagai usaha pembaruan dan pembangunan, antara lain menciptakan lapangan kerja, memberi penyuluhan, mengadakan pendidikan dan pelatihan, pemasaran hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan sebagainya. Dalam konteks pembangunan masyarakat kegiatan fasilitasi dilakukan oleh tenaga khusus

yang bertugas; pertama, membina kelompok masyarakat yang terkena krisis sehingga menjadi satu kebersamaan tujuan dan kegiatan yang berorientasi pada perbaikan kehidupan; kedua, sebagai pemandu atau fasilitator, penghubung dan penggerak (dinamisator) dalam pembentukan kelompok masyarakat dan pembimbing kegiatan kelompok masyarakat (Renova Munte, tesis: 2009).

Keberadaan program SP3 menarik untuk diamati karena dilakukan di wilayah pedesaan dengan sasaran masyarakat sebagai objek program. Fenomena ini menjadi lebih menarik untuk dikaji bagaimana tingkat partisipasi masyarakat binaan terhadap program pemberdayaan SP3 serta tingkat keberdayaannya. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan positif untuk program pemberdayaan yang hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah pihak pemerintahan yang terkait, mengingat banyaknya kegagalan yang terjadi pada program pemberdayaan sebelumnya (Pedoman Umum SP3, 2010).

Analisis pemberdayaan merupakan proses pengidentifikasian keberhasilan dan atau kegagalan suatu rencana, pelaksanaan dan hasil kegiatan program. Analisis ini sangat penting dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan telah dicapai melalui dampak program SP3 terhadap keberdayaan masyarakat binaan sehingga bisa menjadi masukan positif bagi program pemberdayaan selanjutnya. Wilayah studi penelitian ini berada di Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar. Kecamatan Manggarabombang adalah salah satu kecamatan yang menerima program SP3 yang pelaksanaannya dimulai pada tahun 2010 sampai saat ini.

F. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat binaan selama program SP3 berlangsung ?
2. Bagaimana tingkat keberdayaan masyarakat binaan selama program SP3 berlangsung ?
3. Bagaimanakah usulan perbaikan kepada masyarakat binaan SP3 ?

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat binaan selama program SP3 berlangsung .
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat keberdayaan masyarakat binaan selama program SP3 berlangsung.
3. Untuk mengetahui usulan perbaikan kepada masyarakat binaan SP3.

H. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi peneliti yang ingin mengkaji lebih jauh partisipasi serta tingkat keberdayaan masyarakat binaan.
2. Dapat menjadi literatur bagi kalangan akademisi yang ingin dalam mengkaji dampak program terhadap masyarakat binaan dan pihak penyelenggara program agar dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Ife (dalam Suharto, 2005) menjelaskan bahwa pemberdayaan menekankan orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah dan tidak beruntung.

Menurut Ohama (dalam tesis Syamsu Alam 2001), dalam memberdayakan masyarakat yang menjadi langkah pertama adalah penyadaran sosial (*sosial concretization*). Pada masyarakat perlu ditanamkan kesadaran kritis tentang potensi yang mereka miliki untuk bisa mengakses sejumlah daya pada ruang sosial, ruang politik maupun ruang psikologis. Bahwa kemiskinan yang mereka alami bukanlah sepenuhnya karena ketidakmampuan yang melekat pada diri mereka, melainkan karena bekerjanya struktur yang merampas daya kemampuan mereka, dimana daya tersebut dapat diperoleh kembali bila dikalangan mereka tertanam kesadaran untuk memperjuangkannya.

Kedua, yaitu pengorganisasian masyarakat, masyarakat mengorganisir diri dalam satu kelompok yang bertujuan mewujudkan partisipasi masyarakat secara efektif pada setiap perencanaan dan implementasi pengelolaan pembangunan agar dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat setempat.

Ketiga adalah penghantaran sumber daya, adalah masyarakat mengorganisir diri dalam kelompok maka proses pemberdayaan harus dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar mampu mandiri dan mengelola sumber daya pembangunan setempat, dan apabila proses transformasi pembelajaran tetap dilakukan maka akan berdampak pada peningkatan produksi dan perkapita masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*" Chambers, (dalam Zaki Mubarak tesis 2010).

Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman disebut *alternatif development*, yang menghendaki "*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*". upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi.

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi

yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang.

Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan bukan

hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya.

Hal yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pementapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi. Friedman (dalam tesis Zaki Mubarak 2010) menyatakan "*The empowerment approach, which is fundamental to an alternatif development, places the emphasis on autonomy in the decision-making of territorially organized communities, local self-reliance (but not autarchy), direct (participatory) democracy, and experiential sosial learning*".

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurang-berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah.

Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang

lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara sinambung (Ginjar Kartasmita 1997).

B. Konsep Pemberdayaan

Rubin (dalam Yenni Kurnia 2010) mengemukakan 5 prinsip dasar dari konsep pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

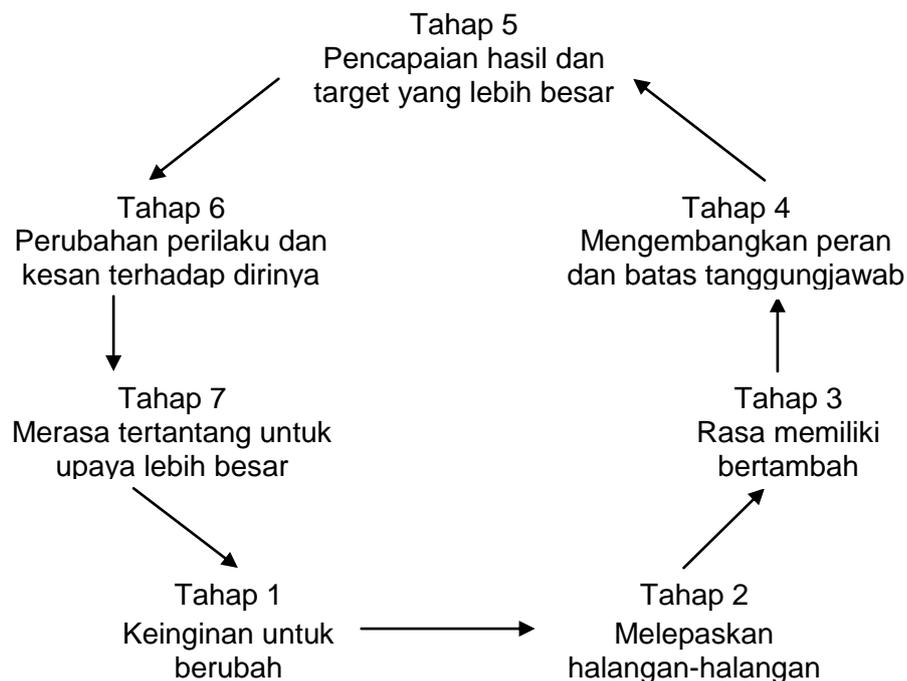
1. Pemberdayaan masyarakat memerlukan *break-even* dalam setiap kegiatan yang dikelolanya, meskipun orientasinya berbeda dari organisasi bisnis, dimana dalam pemberdayaan masyarakat keuntungan yang diperoleh didistribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya.
2. Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan.
3. Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, kegiatan pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha pembangunan fisik.
4. Dalam implementasinya, usaha pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun sumber-sumber lainnya.

5. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro.

Pemahaman mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri, karena pada hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukan dalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya.

Menurut Wilson (dalam Yenni Kurnia 2010) terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat. Tahap pertama yaitu keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Pada tahap kedua, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau faktor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya. Pada tahap ketiga, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggungjawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya. Tahap keempat lebih merupakan kelanjutan dari tahap ketiga yaitu upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggungjawab yang lebih luas, hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Pada tahap kelima ini hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai kelihatan, dimana peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran

kinerja yang lebih baik. Pada tahap keenam telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, dimana keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. Pada tahap ketujuh masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Siklus pemberdayaan ini menggambarkan proses mengenai upaya individu dan komunitas untuk mengikuti perjalanan ke arah prestasi dan kepuasan individu dan pekerjaan yang lebih tinggi. Gambar di bawah ini menunjukkan siklus pemberdayaan masyarakat dalam suatu komunitas.

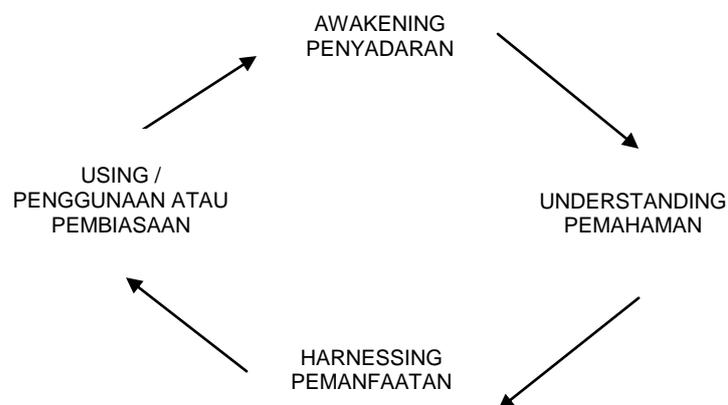


Gambar 1. Siklus pemberdayaan (Wilson, 1996)

Proses bisa diartikan sebagai runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu (Depdiknas, 2003), jadi proses pemberdayaan bisa dimaknai sebagai runtutan perubahan dalam perkembangan usaha untuk

membuat masyarakat menjadi lebih berdaya. Wilson (dalam Yenni Kurnia 2010) memaparkan empat tahapan dalam proses pemberdayaan sebagai berikut:

1. Awakening atau penyadaran, pada tahap ini masyarakat disadarkan akan kemampuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki serta rencana dan harapan akan kondisi mereka yang lebih baik dan efektif.
2. Understanding atau pemahaman, lebih jauh dari tahapan penyadaran masyarakat diberikan pemahaman dan persepsi baru mengenai diri mereka sendiri, aspirasi mereka dan keadaan umum lainnya. Proses pemahaman ini meliputi proses belajar untuk secara utuh menghargai pemberdayaan dan tentang apa yang dituntut dari mereka oleh komunitas.
3. Harnessing atau memanfaatkan, setelah masyarakat sadar dan mengerti mengenai pemberdayaan, saatnya mereka memutuskan untuk menggunakannya bagi kepentingan komunitasnya.
4. Using atau menggunakan keterampilan dan kemampuan pemberdayaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.



Gambar 2. Proses pemberdayaan (Wilson, 1996)

Pemberdayaan adalah sebuah proses, sehingga tidak bisa dipahami sebagai proyek tunggal dengan awal dan akhir. Suatu cara atau filosofi dimana pelaksanaan dan penyesuaiannya.

C. Tujuan Dan Strategi Cara Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan/ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural (Sunyoto Usman, 2004).

Bagaimana strategi atau kegiatan yang dapat diupayakan untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat ?. Ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat.

Strategi 1 : Menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu ; **pertama**, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi

masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. **Kedua**, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggung-jawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan

pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi. **Ketiga**, memberdayakan mengandung pula arti melindungi.

Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Strategi 2 : Program Pembangunan Pedesaan

Pemerintah di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia telah mencanangkan berbagai macam program pedesaan, yaitu (1) pembangunan pertanian, (2) industrialisasi pedesaan, (3) pembangunan masyarakat desa terpadu, dan (4) strategi pusat pertumbuhan (Sunyoto Usman, 2004). Penjelasan macam-macam program sebagai berikut:

Program pembangunan pertanian, merupakan program untuk meningkatkan output dan pendapatan para petani. Juga untuk menjawab keterbatasan pangan di pedesaan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan kerumahtanggaan, serta untuk memenuhi kebutuhan ekspor produk pertanian bagi negara maju. Program industrialisasi pedesaan, tujuan utamanya untuk mengembangkan industri kecil dan kerajinan.

Pengembangan industrialisasi pedesaan merupakan alternatif menjawab persoalan semakin sempitnya rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan dan lapangan kerja dipedesaan. Program pembangunan masyarakat terpadu, tujuan utamanya untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk dan memperkuat kemandirian. Ada enam unsur dalam pembangunan masyarakat terpadu, yaitu: pembangunan pertanian dengan padat karya, memperluas kesempatan kerja, intensifikasi tenaga kerja dengan industri kecil, mandiri dan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, mengembangkan perkotaan yang dapat mendukung pembangunan pedesaan, membangun kelembagaan yang dapat melakukan koordinasi proyek multisektor.

Selanjutnya program strategi pusat pertumbuhan, merupakan alternatif untuk menentukan jarak ideal antara pedesaan dengan kota, sehingga kota benar-benar berfungsi sebagai pasar atau saluran distribusi hasil produksi. Cara yang ditempuh adalah membangun pasar di dekat desa. Pasar ini difungsikan sebagai pusat penampungan hasil produksi desa, dan pusat informasi tentang hal-hal berkaitan dengan kehendak

konsumen dan kemampuan produsen. Pusat pertumbuhan diupayakan agar secara social tetap dekat dengan desa, tetapi secara ekonomi mempunyai fungsi dan sifat-sifat seperti kota.

Senada dengan program pembangunan pedesaan, J. Nasikun (dalam Jefta Leibo, 1995), mengajukan strategi yang meliputi : (1) Strategi pembangunan gotong royong, (2) Strategi pembangunan Teknikal – Profesional, (3) Strategi Konflik, (4) Strategi pembelotan kultural.

Dalam strategi gotong royong, melihat masyarakat sebagai sistem sosial. Artinya masyarakat terdiri dari atas bagian-bagian yang saling kerjasama untuk mewujudkan tujuan bersama. Gotong royong dipercaya bahwa perubahan-perubahan masyarakat, dapat diwujudkan melalui partisipasi luas dari segenap komponen dalam masyarakat. Prosedur dalam gotong royong bersifat demokratis, dilakukan diatas kekuatan sendiri dan kesukarelaan.

1. Strategi pembangunan Teknikal – Profesional

Dalam memecahkan berbagai masalah kelompok masyarakat dengan cara mengembangkan norma, peranan, prosedur baru untuk menghadapi situasi baru yang selalu berubah. Dalam strategi ini peranan agen – agen pembaharuan sangat penting. Peran yang dilakukan agen pembaharuan terutama dalam menentukan program pembangunan, menyediakan pelayanan yang diperlukan, dan menentukan tindakan yang diperlukan dalam merealisasikan program pembangunan tersebut. Agen pembaharuan merupakan kelompok kerja yang terdiri atas beberapa warga

masyarakat yang terpilih dan dipercaya untuk menemukan cara –cara yang lebih kreatif

sehingga hambatan –hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan dapat diminimalisir.

2. Strategi Konflik

Melihat dalam kehidupan masyarakat dikuasai oleh segelintir orang atau sejumlah kecil kelompok kepentingan tertentu. Oleh karena itu, strategi ini menganjurkan perlunya mengorganisir lapisan penduduk miskin untuk menyalurkan permintaan mereka atas sumber daya dan atas perlakuan yang lebih adil dan lebih demokratis. Strategi konflik menaruh tekanan perhatian pada perubahan organisasi dan peraturan (struktur) melalui distribusi kekuasaan, sumber daya dan keputusan masyarakat.

3. Strategi pembelotan kultural

Menekankan pada perubahan tingkat subyektif individual, mulai dari perubahan nilai-nilai pribadi menuju gaya hidup baru yang manusiawi. Yaitu gaya hidup cinta kasih terhadap sesama dan partisipasi penuh komunitas orang lain. Dalam bahasa Pancasila adalah humanis-religius. Strategi ini merupakan reaksi (pembelotan) terhadap kehidupan masyarakat modern industrial yang betrkembang berlawanan dengan pengembangan potensi kemanusiaan.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dalam konsiderannya menyatakan bahwa dalam rangka penumbuhkembangan, penggerakan prakarsa dan partisipasi masyarakat

serta swadaya gotong royong dalam pembangunan di desa dan kelurahan perlu dibentuk kader

Pemberdayaan Masyarakat Desa. Lebih lanjut dinyatakan bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat merupakan mitra Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Desa dan Kelurahan. Adapun peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) intinya adalah mempercepat perubahan (*enabler*), perantara (*mediator*), pendidik (*educator*), perencana (*planer*), advokasi (*advocation*), aktivis (*activist*) dan pelaksana teknis (*technisi roles*) (lihat Pasal 10 Permendagri RI No.7 Tahun 2007). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Permendagri tersebut, tampaknya dalam strategi pemberdayaan masyarakat dapat dinyatakan sejalan dengan Strategi pembangunan Teknikal – Profesional.

D. Partisipasi Masyarakat

Berbicara tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan, orang akan menemukan rumusan pengetahuan yang cukup bervariasi, sejalan dengan luasnya lingkup penggunaan konsep tersebut dalam wacana pembangunan. Miklesen (1999; 64) misalnya menginventarisasi adanya enam tafsiran yang berbeda tentang partisipasi, partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Kedua, usaha dalam membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan menanggapi proyek-proyek pembangunan. Ketiga, partisipasi adalah proses

yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. Keempat, partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek, agar memperoleh informasi mengenai konteks local dan dampak-dampak sosial. Kelima, partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri. Keenam, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangna diri, kehidupan dan lngkungan mereka (Sutomo 2010).

Nasdian (dalam Tesis Yenni Kurnia, 2010) menyatakan bahwa partisipasi adalah proses aktif, inisiatif diambil oleh warga komunitas sendiri, dibimbing cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakansarana dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif. Partisipasi tersebut dapat dikategorikan: warga komunitas dilibatkan dalam tindakan yang telah dipikirkan atau dirancang oleh orang lain dan dikontrol oleh orang lain.

Partisipasi merupakan proses pembentukan kekuatan untuk keluar dari masalah mereka sendiri. Titik tolak partisipasi adalah memutuskan, bertindak kemudian mereka merefleksikan tindakan tersebut sebagai subjek yang sadar. Untuk menjalankan partisipasi secara terus menerus dalam pengambilan keputusan dan pembentukan struktur komunitas memerlukan suatu kegiatan atau kerja yang terus menerus. Logika dasarnya orang akan berpartisipasi dalam kegiatan komunitas apabila kondisinya kondusif untuk melakukan kondisi tersebut.

Kondisi tersebut antara lain jika masyarakat memandang penting isu-isu atau aktifitas tertentu dan warga komunitaslah yang menentukan isu atau tindakan mana yang penting. Bagi orang miskin, orientasi kegiatan pengembangan masyarakat dapat menjawab kebutuhan dasarnya, peningkatan pendapatan, kesehatan dan lain lain. Warga komunitas berpartisipasi jika mereka merasa bahwa tindakannya akan membawa perubahan seperti kegiatan usaha ekonomi yang segera memberikan hasil ataupun kegiatan-kegiatan yang memberikan jaminan sosial lebih menarik orang untuk berpartisipasi daripada usaha-usaha ekonomi tahunan atau musiman.

Perbedaan bentuk-bentuk partisipasi harus diakui dan dihargai. Partisipasi komunitas hendaknya dapat dilakukan oleh siapapun juga dengan mempertimbangkan keragaman keterampilan, bakat dan minat. Seseorang harus dimungkinkan untuk berpartisipasi dan didukung dalam partisipasinya. Struktur dan proses partisipasi hendaknya tidak bersifat menjauhkan. Oleh karena itu diperlukan metode-metode yang partisipatif.

Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat adalah partisipasi dalam keseluruhan proses pembagunan mulai dari pengambilan keputusan dalam identifikasi masalah dan dan kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan program, serta dalam evaluasi dan menikamati hasil (Sutomo 2010).

Menurut Prety, J., 1995, ada tujuh karakteristik tipologi partisipasi, yang berturut-turut semakin dekat kepada bentuk yang ideal, yaitu :

1. Partisipasi pasif atau manipulatif

Ini merupakan bentuk partisipasi yang paling lemah. Karakteristiknya adalah masyarakat menerima pemberitahuan apa yang sedang dan telah terjadi. Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tidak memperhatikan tanggapan masyarakat sebagai sasaran program. Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran belaka.

2. Partisipasi informatif

Di sini masyarakat hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk proyek, namun tidak berkesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses keputusan. Akurasi hasil studi, tidak dibahas bersama masyarakat.

3. Partisipasi konsultatif.

Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, sedangkan orang luar mendengarkan, serta menganalisis masalah dan pemecahannya. Dalam pola ini belum ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama. Para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.

4. Partisipasi insentif

Masyarakat memberikan korbanan dan jasa untuk memperoleh imbalan insentif berupa upah, walau tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan.

Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif dihentikan.

5. Partisipasi fungsional

Masyarakat membentuk kelompok sebagai bagian proyek, setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati. Pada tahap awal, masyarakat tergantung kepada pihak luar, tetapi secara bertahap kemudian menunjukkan kemandiriannya.

6. Partisipasi interaktif

Masyarakat berperan dalam proses analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan, Pola ini cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.

7. Mandiri (*self mobilization*)

Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi pihak luar) untuk merubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung. Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan dan dukungan teknis serta sumberdaya yang diperlukan. Yang terpenting, masyarakat juga memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan.

Konsep pembangunan yang partisipatif merupakan suatu proses pemberdayaan pada masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, maka konsep pembangunan partisipatif mengandung tiga unsur penting, yaitu: (1) Peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan, implementasi pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan, dan evaluasi proses pembangunan, (2) Orientasi pemahaman masyarakat akan peran tersebut, dan (3) Peran pemerintah sebagai fasilitator.

Partisipasi mendorong setiap warga masyarakat untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi masyarakat dapat terwujud seiring tumbuhnya rasa percaya masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan di daerah. Rasa percaya ini akan tumbuh apabila masyarakat memperoleh pelayanan dan kesempatan yang setara (*equal*). Pembedaan perlakuan atas dasar apapun dapat menumbuhkan kecemburuan dan mendorong terjadinya konflik sosial di masyarakat.

Melalui pembangunan yang partisipatif, masyarakat diharapkan dapat: (1) Mampu secara kritis menilai lingkungan sosial ekonomi mereka sendiri mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu diperbaiki, (2) Mampu menentukan visi masa depan yang ingin masyarakat wujudkan, (3) Dapat berperan dalam perencanaan masa depan mereka sendiri dalam masyarakatnya tanpa menyerahkannya kepada ahli atau kelompok

berkuasa, (4) Dapat menghimpun sumber-sumber daya di dalam masyarakat dan juga di dalam lingkup anggotanya untuk merealisasi tujuan bersama, (5) Dapat memperoleh pengalaman dalam menyatakan, menganalisa situasi dan mengidentifikasi strategi yang tepat dan realistis untuk suatu kehidupan yang baik, (6) Karenanya anggota masyarakat menjadi tokoh individual yang dapat bekerja atas dasar persamaan, (7) Desa dan masyarakat akan menyelesaikan tugas dan proyek swadaya, karena masyarakat tidak tergantung pada bantuan dari luar, yang juga akan menjadi dasar menuju kemandirian, dan (8) Dalam proses ini akan dibangun hubungan yang erat dan integratif diantara anggota masyarakat (Agus Purbahatin Hadi, 2010).

E. Tujuan Pemberdayaan

Proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Namun dalam beberapa situasi strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual meskipun pada gilirannya akan tetap berkaitan dengan kolektivitas. Pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dilakukan melalui penerapan pendekatan pemberdayaan dan pelaksanaan pendekatan tersebut berpijak pada pedoman dan prinsip pekerjaan social. Suharto, (dalam Yenni Kurnia 2010).

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan:

1. Pemungkinan

Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat;

2. Penguatan

Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap pengetahuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka;

3. Perlindungan

Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil;

4. Penyokongan

Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan; dan

5. Pemeliharaan

Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. (Suharto 2005) Penggunaan strategi pemberdayaan masyarakat didasarka pada asumsi, kondisi dan kebutuhan dari masing-masig organisasi. Terdapat enam strategi dalam yang kita kenal yaiu:

- a. Strategi terapi pendidikan (education therapy)

- 1) Meningkatkan kompetensi dan kapsitas masyarakat:
- 2) Mengembangkan rasa percaya diri

- b. Strategi perubahan tingkah laku (behavior change)
- c. Strategi tambahan staf (stff supplement)
- d. Strategi kemitraan (cooptation)
- e. Strategi kekuatan masyarakat (comunity power)
- f. Strategi pembelaan (advokacy)

Suatu strategi pemberdayaan harus berupaya memaksimalkan kekuasaan efektif bagi setiap orang atas distribusi dan pemanfaatan sumber daya, dan memperbaiki ketidakadilan yang terjadi atas akses kepada sumber daya.(Jim ife. 2009).

F. Pendampingan Masyarakat

Pendampingan pada dasarnya merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pada proses pengambilan keputusan berbagai kegiatan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang partisipatif. (<http://www.deptan.go.id /PKPM/pendampingan>)

Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh PL atau fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Pada prakteknya, di kalangan LSM CD, pendampingan lebih banyak ditujukan untuk pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin meskipun disertai penguatan organisasi dan

kepemimpinan lokal. Sedangkan di LSM CO, pendampingan lebih banyak ditujukan untuk advokasi dan melakukan „perlawanan“ masyarakat terhadap isu-isu konflik (penggusuran tanah, pelanggaran HAM, pertambangan, lingkungan, dan sebagainya yang ditujukan kepada pemerintah, industri/swasta, atau kekuatan yang dianggap sebagai „musuh“ rakyat. Sebenarnya, perbedaan pendampingan kedua kalangan itu masih merupakan bagian dari dikotomi LSM CD dan LSM CO yang pada tulisan terdahulu sudah dijelaskan. Dikotomi ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila pendampingan dipahami sebagai suatu upaya pengembangan masyarakat secara multidimensi.

Pendampingan yang dilaksanakan oleh PL/CF meliputi banyak jenis kegiatan. Kegiatan teknis program (misalnya pertanian) seringkali menjadi kegiatan utama seorang PPL, disertai dengan kegiatan-kegiatan lainnya (seperti pengelolaan program mulai dari perencanaan sampai monev, pengembangan organisasi masyarakat baik berupa kelompok tani, KSM/UB, sampai ke pengembangan jaringan seperti forum petani atau jaringan pemasaran, yang disertai juga dengan pelatihan kepemimpinan lokal agar mereka bisa mengelola organisasi-organisasi tersebut dengan baik).

Dengan semakin luasnya pekerjaan seorang pendamping atau PL/CF, muncul pertanyaan: Apakah sebenarnya tugas utama seorang PL/CF? Apakah sebagai pelaksana transfer informasi dan teknologi (penyuluh) atau sekaligus sebagai ahli (expert) dalam penguasaan teknologi tertentu? Apakah hanya sebagai fasilitator masyarakat untuk bisa

mengakses sumber-sumber informasi dan teknologi yang tersedia, karena tugas PL lebih sebagai pembuka katup-katup hubungan antara kelompok-kelompok masyarakat dan antara masyarakat dengan berbagai institusi sosial-politik? Apakah tugas PL untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan teknis, atautkah fasilitator pengembangan pembelajaran bersama yang lebih bersifat umum?. Pertanyaan-pertanyaan ini sebaiknya satu per satu dijawab untuk merumuskan apa tugas pendamping/PL/CF dan akhirnya akan diuraikan menjadi jenis-jenis kegiatan pendampingan yang akan dijalankannya.

G. Evaluasi Program

Evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui efektivitas komponen program dalam mendukung pencapaian tujuan program. Makna dari evaluasi program sendiri mengalami proses pematapan. Evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan (Suharto, 2005). Sehubungan dengan definisi tersebut *The Stanford Evacuation Consortium Group* menegaskan bahwa meskipun evaluator menyediakan informasi, evaluator bukanlah pengambil keputusan tentang suatu program. Tanpa ada evaluasi, keberhasilan dan kegagalan program tidak dapat diketahui.

Evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya (Arikunto,1995).

Setiap kegiatan tentu mempunyai tujuan, demikian juga evaluasi program. Secara singkat evaluasi program merupakan upaya untuk mengukur ketercapaian program yaitu mengukur sejauh mana sebuah kebijakan dapat terimplementasikan. Evaluasi program adalah penelitian yang mempunyai ciri khusus yaitu melihat keterlaksanaan program sebagai realisasi kebijakan untuk menentukan tindak lanjut dari program yang dimaksud. Jika kesimpulan penelitian diikuti dengan saran maka evaluasi program selalu harus mengarah pada pengambilan keputusan sehingga harus diakhiri dengan rekomendasi kepada pengambil keputusan.

1. Evaluasi Pemberdayaan

UNDP (2002) mendefinisikan evaluasi sebagai kegiatan selektif yang mencoba mengkaji perkembangan dan pencapaian suatu hasil secara sistematis dan objektif. Dalam sebuah program, evaluasi tidak hanya dilakukan satu kali namun penilaian dilakukan berulang dan dilaksanakan berdasarkan lingkup dan kedalaman yang berbeda pada beberapa tahapan waktu untuk menilai pencapaian pengetahuan dan pembelajaran dalam upaya pencapaian hasil (*outcome*).

Evaluasi pemberdayaan didefinisikan sebagai pendekatan evaluasi yang mengarah pada upaya meningkatkan kemungkinan pencapaian keberhasilan program pemberdayaan yang lebih baik (Wandersman dalam Fetterman, 2007).

Fetterman (2007) juga menjelaskan bahwa evaluasi pemberdayaan adalah merupakan proses untuk mendapatkan gambaran diri melalui evaluasi dan refleksi diri dalam tataran individu

ataupun grup guna meningkatkan kualitas dirinya melalui inisiatifnya sendiri.

Terdapat beberapa pendekatan-pendekatan dan model-model evaluasi pemberdayaan. Guijt (2000) dan Rietbergen-McCracken (1998) menjelaskan bahwa evaluasi pemberdayaan harus dilakukan sendiri oleh masyarakat melalui rangkaian kegiatan partisipatif (*participatory monitoring & evaluation/PM&E*).

Prinsip dalam PM&E adalah bahwa masyarakat lokal berperan sebagai partisipan aktif, semua *stakeholder* ikut mengevaluasi sedangkan pihak luar hanya memfasilitasi, fokus pada pengembangan kapasitas *stakeholder* dan proses yang ada ditujukan untuk membangun komitmen guna kemajuan dan tindakan korektif.

Evaluasi partisipatif berbeda dengan pendekatan evaluasi konvensional (Riebergen-McCracken, 1998), dimana pendekatan evaluasi tradisional cenderung bersifat linear dan lebih berfungsi untuk menilai akuntabilitas manajemen dan keuangan sedangkan evaluasi partisipatif lebih bersifat *open-ended* dan *iterative* (berulang) dan lebih berfungsi untuk menjawab kebutuhan terhadap perubahan dalam kegiatan.

Kritik Cousins (2005) terhadap teori evaluasi pemberdayaan Fetterman menyatakan bahwa tindakan evaluasi bisa dilihat dari dua sisi, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh praktisi evaluasi atau bersifat praktis dan evaluasi yang dilakukan oleh peneliti/*teorist*. Oleh karena itu penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini berusaha untuk

menggunakan pendekatan-pendekatan dan prinsip-prinsip evaluasi partisipatif namun dilakukan oleh peneliti di luar komunitas itu sendiri.

2. Prinsip Evaluasi Pemberdayaan

Konsep evaluasi pemberdayaan yang dikemukakan Fetterman dan Wandersman (2007) lebih mengarah pada evaluasi faktor-faktor eksplisit daripada yang bersifat implisit. Fetterman menyampaikan 10 prinsip-prinsip dalam evaluasi pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- a. *Improvement* (peningkatan)
- b. *Community ownership* (kepemilikan komunitas)
- c. *Inclusion* (inklusi)
- d. *Democratic participation* (partisipasi demokrasi)
- e. *Sosial justice* (keadilan sosial)
- f. *Community knowledge* (tingkat pengetahuan komunitas)
- g. *Evidence-based strategies* (strategi berbasis alasan)
- h. *Capacity building* (pengembangan kapasitas)
- i. *Organizational learning* (Pembelajaran organisasi)
- j. *Accountability* (akuntabilitas)

Prinsip-prinsip evaluasi tersebut di atas merupakan panduan untuk melakukan evaluasi per-bagian dari proses pemberdayaan, baik secara konseptual maupun dalam implementasinya. Dari pemaparan di atas terlihat bahwa evaluasi kinerja pengembangan kapasitas merupakan salah satu aspek dalam kerangka evaluasi pemberdayaan masyarakat secara luas.

Untuk meneliti atau mengevaluasi kinerja pengembangan kapasitas dalam proses pemberdayaan masyarakat, UNDP (2008) memaparkan kerangka kerja/*framework* yang merupakan dimensi penilaian yang terdiri dari masukan (*points of entry*), isu utama (*core issues*), dan kapasitas fungsional/teknis (*technical/functional capacities*).

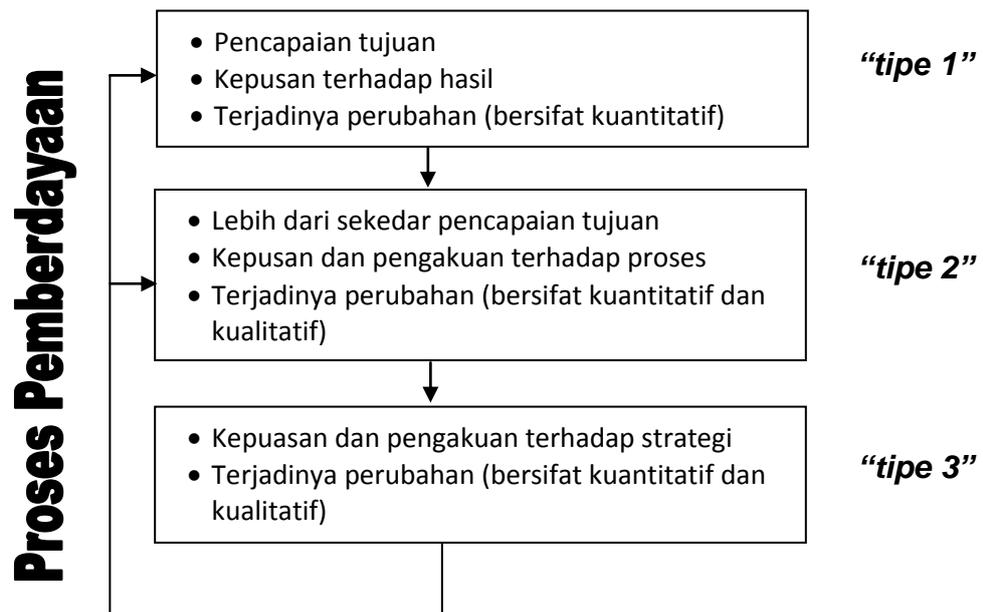
Masukan (*points of entry*) dalam pengembangan kapasitas menurut UNDP (2008) dibedakan berdasarkan tingkatannya yaitu pengembangan kapasitas dalam level sistem, kelembagaan dan individu. Dimensi kedua yaitu isu utama (*core issues*) yang merupakan *domain/ranah* dalam pengembangan kapasitas yang terdiri dari penataan kelembagaan (*institutional arrangement*), kepemimpinan (*leadership*), pengetahuan (*knowledge*), dan akuntabilitas (*accountability*). Empat ranah dalam pengembangan kapasitas tersebut merupakan acuan tetapi biasa dikembangkan lebih lanjut dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan situasi yang dihadapi. Dimensi ketiga dalam *framework* pengembangan kapasitas yang yaitu kapasitas fungsional/teknis. Pengembangan kapasitas masyarakat dalam proses pemberdayaan dibedakan menjadi dua yaitu kapasitas fungsional yang merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas manajerial yang dibutuhkan untuk menyusun, mengimplementasikan dan mereview kebijakan, strategi, program dan kegiatan, dan kapasitas teknis yang merupakan upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis praktis, seperti perubahan iklim, kesehatan, pemilihan langsung, dsb.

Kerangka kerja/*framework* dalam evaluasi pengembangan kapasitas tersebut, dapat kita gunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi capaian kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat dengan melihatnya dari sisi *outcome* atau hasil yaitu perubahan sikap dan cara pandang masyarakat mengenai suatu hal dalam komunitasnya dari kondisi sebelum mendapatkan program pengembangan dan kondisi setelah mendapatkan program tersebut.

3. Model Evaluasi Pemberdayaan Fujikake

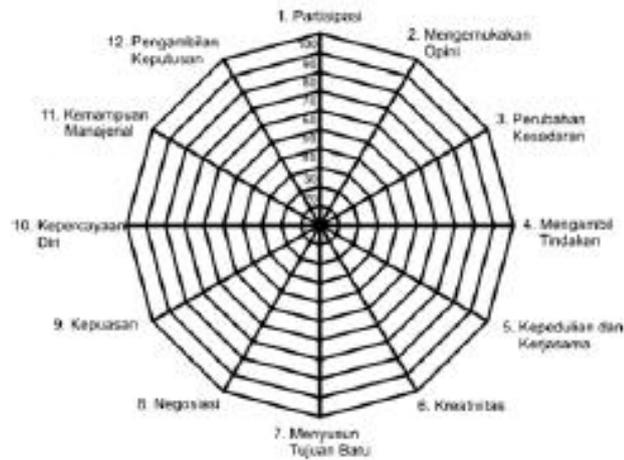
Model evaluasi pemberdayaan adalah salah satu bentuk alat analisis yang bisa digunakan untuk mengukur derajat keberdayaan suatu masyarakat. Pendekatan analisis yang digunakan oleh Fujikake (2008) dalam mengevaluasi pemberdayaan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mencoba memahami pencapaian pemberdayaan dari pandangan masyarakat sebagai pelaksana program. Pendekatan ini mencoba memahami hubungan antara tanggapan masyarakat dengan tujuan pemberdayaan itu sendiri untuk kemudian dituangkan dalam gambar-gambar dan skema-skema konsep tertentu. Model evaluasi yang dikembangkan Fujikake telah dipraktikkan dalam mengevaluasi pemberdayaan perempuan di sebuah desa di Paraguay Fujikake (2008) mengembangkan empat langkah dalam mengevaluasi pemberdayaan. Tahap pertama adalah melihat perubahan masyarakat dari tingkat kesadarannya. Hasil dari analisis mengenai perubahan tingkat kesadaran ini dituangkan dalam grafik yang

menggambarkan tingkat perubahan kesadaran yang diklasifikasikan menjadi 3 yaitu “sangat baik”, “telah berubah”, dan “tidak seperti sebelumnya”



Gambar 3. Tiga tipe hasil pemberdayaan (Fujikake, 1998)

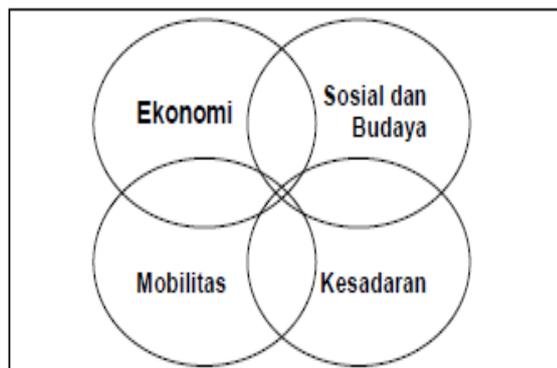
Tahap kedua dalam evaluasi pemberdayaan yang dikembangkan Fujikake adalah menilai tanggapan masyarakat dan praktik pemberdayaan yang didasarkan pada penilaian terhadap 12 indikator yang merupakan sub-project dari proses pemberdayaan itu sendiri. Keduabelas indikator tersebut yaitu tingkat partisipasi, pengemukaan opini, perubahan kesadaran, pengambilan tindakan, kepedulian dan kerjasama, kreativitas, menyusun tujuan baru, negosiasi, kepuasan, kepercayaan diri, keterampilan manajerial, dan pengumpulan keputusan.



Gambar 4. Evaluasi pemberdayaan menggunakan 12 indikator

(Fujikake,1998)

Tahap ketiga adalah mengelompokkan dan menghubungkan antar indikator yang telah dianalisis pada model 2 pada tahap sebelumnya. Hasil analisis pada tahap ini adalah grafik keterkaitan antar elemen ini dalam pemberdayaan, yaitu ekonomi, sosial dan budaya, kesadaran dan mobilitas.



Gambar 5. Empat elemen inti pemberdayaan (Fujikake, 1998)

Tahap keempat adalah mengukur tingkatan pencapaian pemberdayaan itu sendiri, apakah pengaruh dari proses pemberdayaan itu hanya pada tataran lokal, regional atau nasional. Fujikake menggolongkan

tingkatan pemberdayaan menjadi tiga yaitu *micro level* (desa), *meso level* (kota/wilayah), dan *macro level* (nasional).

Hasil dari analisis ini digambarkan dalam grafik tingkatan pemberdayaan, yang disebut sebagai model Fujikake 4.



Gambar 6. Tingkatan pemberdayaan (Fujikake, 1998)

H. Pembangunan Pedesaan

1. Pembangunan Desa

Pertumbuhan pembangunan di pedesaan sejauh ini tampak lambat dan bersifat alami. Investasi pembangunan yang dicerminkan melalui aktifitas proyek-proyek baik pemerintah maupun swasta nyaris kurang memberikan dampak signifikan terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat. Karena tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan relatif masih tinggi. Data susenas 2004 menunjukkan bahwa 64% dari total penduduk miskin di Indonesia tinggal dan meyebar diwilaya pedesaan. Disamping rendahnya inovasi atau bahkan ketidaksesuaian jenis proyek dengan kebutuhan masyarakat, juga

disebabkan faktor terbatasnya sumber daya manusia terdidik yang mendedikasikan diri kedesa.

Keberhasilan pelaksanaan undang-undang nomor 22/1998 tentang Otonomi Daerah akan diukur sejauhmana perubahan kondisi dan posisi masyarakat dari aspek sosial, ekonomi dan politik menjadi lebih baik dibandingkan era pembangunan yang sentralistis. Dalam konteks ini, maka penyelenggara pembangunan menghendaki distribusi kekuasaan dan wewenang dari pemerintah ke masyarakat. Dengan demikian, kedepan peran dan keberadaan wilayah pedesaan sebagai pondasi dalam meningkatkan efektifitas pembangunan daerah memiliki arti sangat strategis, mengingat desa merupakan basis didalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan. Termasuk pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

Dengan demikian, kedudukan desa bukan sebagai objek bukan subjek dalam konteks otonomi daerah., dimana desa harus mampu menjalankan peran dan fungsi manajemen dalam pengelolaan sumber daya pembangunan. Optimalnya peran dan fungsi desa dapat memacu proses pembangunan daerah akan sangat dipengaruhi oleh sejauhmana desa (masyarakat) mampu menggerakkan, mendayagunakan dan mengembangkan potensi sumberdaya bagi menentukan aktifitas pembangunannya sesuai dengan dinamika sosial budaya politik di tingkat masyarakatnya. Sehingga pembangunan perdesaan mendapat dukungan dan partisipasi dari masyarakat luas karena memiliki dimensi keadilan dan pertumbuhan yang menjamin keselamatan rakyat.

Yang menjadi persoalan adalah kedudukan desa selama ini hanyalah sebagai objek dari berbagai pihak untuk melaksanakan agendanya masing-masing. Bahkan terkesan kedudukan desa dipandang dalam perspektif fisik yaitu, sebagai kantor pemerintah desa yang berfungsi untuk memberikan pelayanan dan tugas administrasi. Relatif sedikit melihat untuk menepatkan desa sebagai miniatur negara, dimana terdapat hubungan yang dinamis antara rakyat dan pemerintah serta pasara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Implikasi kedudukan desa tersebut merupakan faktor dari terbebasnya perhatian dan alokasi sumberdaya yang diberikan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan dan ketidakadilan. Kendati secara kuantitatif, cukup banyak aktifitas proyek pembangunan, namun kurang menjawab persoalan kemiskinan dan pengembangan asset masyarakat. Bahkan sebaliknya sumber daya desa telah dieksploitasi bagi kepentingan pihak luar. Misalnya, dalam kasus pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya lingkungan.

Implikasinya desa nyaris tidak atau kurang memiliki aset (sumberdaya alam, kelembagaan, zona ekonomi, dan sumberdaya manusia). Yang memungkinkan untuk memulai dan mengembangkan kreasi dalam menjawab berbagai masalah dan tantangan kehidupan yang sangat kompleks, terutama dalam mengurangi tekanan kemiskinan dan ketidakadilan diantara warga maupun antar wilayah. Salah satu masalah utama yang nampak dalam keterbatasan sumberdaya manusia yang berkualitas baik sebagai perencana maupun sebagai penggerak ataupun

pelaksana untuk memacu perubahan sosial ekonomi politik ditingkat perdesaan.

Pendekatan yang fungsional dan komprehensif dalam memfasilitasi masyarakat desa, kelak dapat mewujudkan produktifitas, peningkatan kondisi sosial-ekonomi yang berkelanjutan karena tidak rentang terhadap perubahan kebijakan makro ekonomi. Bahkan mampu menciptakan sinergi dan hubungan masyarakat dengan pihak luar dalam memacu pertumbuhan ekonomi desa. Sehingga dalam jangka panjang masalah yang sangat fundamental seperti kemiskinan, ketimpangan dalam pemilikan sumberdaya, disfungsionalisasi kelembagaan desa dan hilangnya hak-hak masyarakat, secara bertahap dapat dikurangi. Gagasan pembangunan pemuda terdidik di pedesaan merupakan salah satu strategi yang dimaksudkan untuk mendorong dan memperkuat potensi masyarakat desa dalam merespon tantangan efektifitas pembangunan di desa melalui peberdayaan sosial dan ekonomi.

2. Pemuda Terdidik

Mencari pendekatan pola alternatif dalam pengembangan kemudaan sesungguhnya tidak mudah. Rasanya masyarakat dihadapkan pada pengalaman kurang optimalnya sejumlah program kepemudaan sebelumnya. Namun pemuda mandiri, pemuda pelopor, wirausaha pemuda dan lainnya secara umum tetap memiliki keterbatasan. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat program yang relatif sukses, namun secara kuantitatif masih terbatas. Hal ini tidak terlepas dari belum mampunya

pemerintah dan lembaga terkait dalam menciptakan dan mengembangkan sumber daya kaum muda yang cakap dan terampil selama program dilaksanakan.

Persoalan diatas memberi inspirasi bagi semua pihak untuk melakukan pemikiran ulang dalam menjadikan kaum muda terdidik sebagai asset pembangunan. Dilain pihak, market feasibility yang semakin besar karena perkembangan ekonomi, maka kaum muda hanya didingat sebagai objek dalam pemenuhan tenaga kerja. Selain daya pemerintah dalam mengembangkan produktifitas kaum muda kurang terkordinasi, perhatian sejumlah pihak LSM dan swasta terhadap potensi kaum muda juga terbatas. Kalaupun ada program kepemudaan biasanya timbul tenggelam dalam masa singkat dan tidak menyentuh akar persoalan.

Karena itu, mengembangkan pendekatan dan alternatif baru dalam program produktifitas kaum muda terutama di pedesaan perlu melihat konteks sosial, ekonomi dan politik yang ada baik di tingkat nasional maupun local. Persoalan apa dari kaum muda yang akan diisi, pendekatan apa yang mau diprogramkan, serta dukungan kebijakan apa yang dibutuhkan menjadi penting. Hal ini bukan semata-mata untuk menjawab kekosongan, kemandekan, ataupun keterbatasan dari program-program yang ada melainkan juga dimaksudkan untuk melengkapi terutama dari sisi pengorganisasian dan pemberdayaan bagi semuanya. Dengan kata lain, maka yang dimaksudkan adalah memperkuat program kepemudaan yang terdidik yang mampu mensinergikan berbagai sumber daya yang ada dalam menggerakkan pembangunan di pedesaan.

I. Gambaran Pelaksanaan Program SP3 di Kecamatan Mangarabombang

1. Kondisi Pemuda di Desa Manggarabombang

Pemuda di Desa Manggarabombang merupakan salah satu sasaran program SP3 di kabupaten takalar, penilaian ini mengacu pada wilayah desa Manggarabombang yang cukup potensial dari segi sumber daya alam dan manusia, namun kurang produktif. Tercatat dalam data BPS Kabupaten Takalar, 770 pemuda desa yang menganggur. Melihat kondisi ini maka pemerintah melalui dinas pendidikan pemuda dan olahraga Kabupaten Takalar mencanangkan program SP3 sebagai bagian dari usaha memberdayakan pemuda untuk lebih produktif.

2. Pengertian Program Kewirausahaan Pemuda melalui SP-3

Program Kewirausahaan Pemuda melalui SP-3 adalah sinergi Program Pendidikan Kecakapan Hidup yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional dengan program SP-3 yang diselenggarakan oleh Asistem Deputi Kepeloporan Pemuda, Deputi Bidang Kepemimpinan Pemuda, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga dalam rangka pembelajaran pemuda di desa binaan SP-3, agar memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola usaha mandiri, serta menumbuh-kembangkan sikap mental

wirausaha agar dapat mengelola potensi diri dan sumberdaya lingkungannya.

3. Tujuan Program

Tujuan penyelenggaraan Program Kewirausahaan Pemuda melalui SP-3 adalah:

- a. Memberikan kesempatan bagi para pemuda desa binaan SP-3 dalam upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental wirausaha sebagai bekal kemandirian pemuda.
- b. Meningkatkan peran, fungsi, dan penguatan SP-3 sebagai pelopor dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan di desa dimana ditempatkan.

4. Sasaran Program

Sasaran program Kewirausahaan Pemuda melalui SP-3 yang dananya tersedia pada DIPA BP-PNFI Regional I Tahun Anggaran 2009 sebanyak **100 orang**. Dana untuk 1 orang peserta sebesar Rp. 1.000.000,-

a. Ruang Lingkup

1) Penyelenggara Program

Penyelenggara program kewirausahaan pemuda melalui SP-3: SP-3 Angkatan XVII (2010) dan XVIII (2013) yang tergabung dalam kelompok yang ditetapkan oleh dinas yang menangani program SP-3 tingkat provinsi.

2) Persyaratan Penyelenggara Program

Kelompok SP-3 :

- a) Memiliki SK Penetapan Kelompok dari Instansi Pengelola Program SP-3 Tingkat Provinsi,
- b) Memiliki Nomor Rekening Bank atas nama Kelompok SP-3,
- c) Memiliki NPWP atas nama Kelompok SP-3,
- d) Berdomisili di lokasi desa penempatan dibuktikan dengan keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat;
- e) Memiliki masyarakat binaan 21 – 25 orang.

3) Peserta Program

a. Kriteria Peserta Program

Kriteria peserta program PKH adalah:

1. Pemuda usia produktif (18-35 tahun)
2. Menganggur
3. Berasal dari keluarga tidak mampu;
4. Minimal dapat baca, tulis, hitung;
5. Memiliki kemauan untuk belajar dan bekerja, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Peserta Program.
6. Berdomisili di desa dimana SP-3 ditempatkan.

b. Rekrutmen dan Seleksi Peserta Program

1. SP-3 merekrut calon masyarakat binaan/peserta program dari desa penugasan sesuai dengan jumlah yang diusulkan,
2. Daftar nama masyarakat binaan/Peserta Program disahkan Kepala Desa/Lurah setempat dan disampaikan kepada Kepala

BPPNFI Regional I setelah ada penetapan sebagai Penyelenggara Program.

4) Fasilitas dan Program Pembelajaran

- a) Fasilitas pembelajaran (gedung, tempat pembelajaran, alat-alat praktek, dan sebagainya), kurikulum, bahan ajar, proses pendidikan dan pelatihan menjadi tanggungjawab lembaga penyelenggara (Kelompok SP-3),
- b) Pendidikan dan pelatihan dalam program kewirausahaan pemuda ditekankan pada penguasaan keterampilan bidang jasa/produksi,
- c) Narasumber teknis direkrut dari lembaga mitra (lembaga pendidikan dan pelatihan/unit usaha) yang memiliki kompetensi profesional di bidangnya,
- d) Kegiatan pembelajaran ini ditindaklanjuti dengan rintisan usaha mandiri

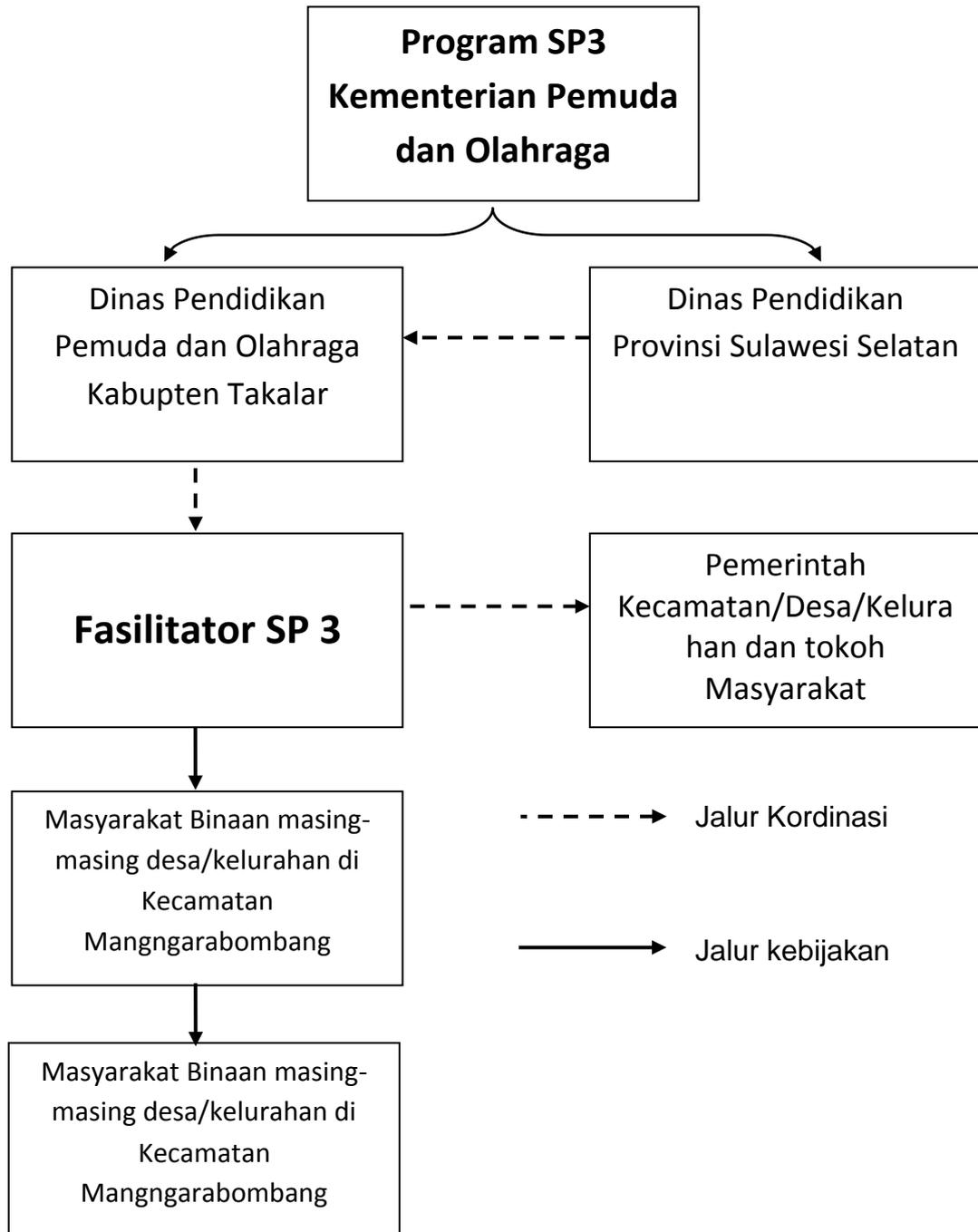
5) Jenis Keterampilan/Vokasi

Keterampilan yang diselenggarakan dalam program kewirausahaan pemuda adalah jenis keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja/usaha mandiri. Prioritas jenis keterampilan yang relevan dengan pasar kerja/wirausaha bidang jasa maupun produksi yang berbasis potensi lokal, antara lain :

Tabel 1. Jenis keterampilan/vokasi

No.	Bidang Jasa	Bidang Produksi
1.	Menjahit	1. Pertanian
2	Tata Kecantikan Kulit/Rambut	2 Perkebunan
3	Tata Rias Pengantin	3 Perikanan darat dan laut
4	Jasa Boga	4 Kehutanan
5	Otomotif/perbengkelan/Stir	5 Peternakan
	Mobil	
6	Elektronika	6 Pertambangan
7	Komputer	7 Keterampilan produksi
		lainnya
8	Pariwisata (Perhotelan)	yang dianggap laku di pasar
9	Sablon	sekitar (marketabel)
10	Service Handphone	
11	Pertukangan	
12	Bengkel Las	
13	Pramuwisma	
14	Jenis Keterampilan bidang jasa	
	lainnya sesuai kebutuhan pasar	
	kerja dan usaha di lingkungan	
	masyarakat	

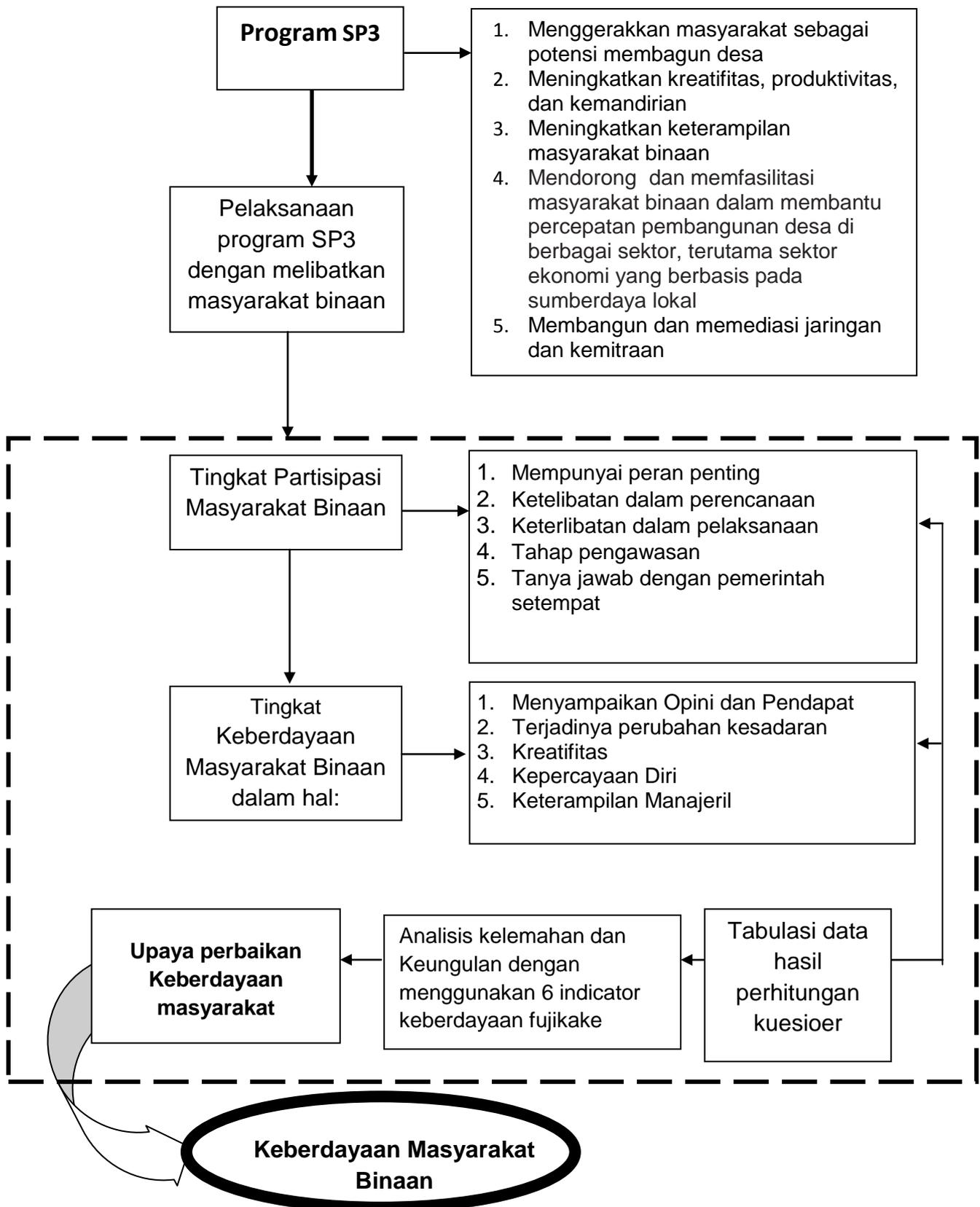
Sumber: Pedoman SP3 Kemenpora 2010



Gambar 7. Struktur organisasi SP3

I. Kerangka Pikir

Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP3) merupakan program pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dibuat berlandaskan Undang-undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Program ini dibuat untuk mengurangi pemuda sarjana (S1) yang belum tertampung oleh lapangan pekerjaan untuk meningkatkan ekonomi di pedesaan. Sehingga pemuda sarjana dapat mengembangkan potensi dirinya dalam memberdayakan masyarakat. Pelaksanaan program SP3 yang melibatkan masyarakat perlu dianalisis khususnya tingkat partisipasi dan tingkat keberdayaan masyarakat binaan. Berikut adalah kerangka pikir penelitian.



Gambar 8. Kerangka pikir penelitian

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, maka penjelasan kerangka pikir tersebut adalah sebagai berikut, program Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP3) antara lain dilaksanakan untuk menggerakkan masyarakat sebagai potensi membangun desa, meningkatkan kreatifitas, produktivitas, dan kemandirian, meningkatkan keterampilan masyarakat binaan, mendorong dan memfasilitasi masyarakat binaan dalam membantu percepatan pembangunan desa di berbagai sektor, terutama sektor ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal, dan membangun serta memediasi jaringan dan kemitraan.

Pelaksanaan program SP3 khususnya tingkat partisipasi dan keberdayaan perlu dianalisis. Tingkat partisipasi masyarakat yang diukur meliputi partisipasi masyarakat dalam hal peran penting, ketelibatan dalam perencanaan, keterlibatan dalam pelaksanaan dan pengawasan dan tanya jawab dengan pemerintah setempat. Tingkat keberdayaan diukur dengan melihat kemampuan masyarakat dalam menyampaikan opini dan pendapat, adanya perubahan kesadaran, kreatifitas, kepercayaan diri dan keterampilan manajerial.

Tingkat partisipasi dan keberdayaan diukur dengan menggunakan kuesioner dan selanjutnya dilakukan analisis kelemahan dan keunggulan dengan menggunakan 6 indikator keberdayaan fujikake. Dari hasil analisis tersebut maka akan diusulkan usulan perbaikan dari peneliti kepada masyarakat binaan SP3.